

RISK REGISTER HASIL EVALUASI PADA KECAMATAN DENPASAR BARAT
KOTA DENPASAR TAHUN 2026

No	Nama OPD	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran RKA 2026 (Rp)	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Risiko (Uraian)	Skenario Risiko	Kode Risiko	Jenis Risiko Fraud	Pemilik	Hasil Evaluasi Risiko						Risiko Komposit								
												Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Status Risiko	Eksisting Control (Pengendalian yang sudah ada)	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
												Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena										
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	
1	KECAMATAN DENPASAR BARAT		20.123.675.248,00																							
2		Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	20.995.452.559	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Publik	Persentase Pemenuhan Layanan Sekretariat	Belum terlaksananya program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah secara maksimal dalam layanan sekretariat	Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan	ROO.26.41.37.01		Camat	Internal	Internal	C	Program Tidak Terlaksana Dengan Baik	Kecamatan Denpasar Barat	2	1	2	Sangat Rendah	Koordinasi baik secara internal maupun eksternal	Melaksanakan Rapat Koordinasi di Kecamatan Denpasar Barat	2	1	2	
3							Mark-up Kebutuhan Barang/Peralatan Kantor	Pengajuan jumlah atau spesifikasi barang kantor yang lebih-lebihkan (overstated), tidak sesuai kebutuhan nyata, atau diluar agar memberi ruang pembengkakan anggaran.	RF.26.41.37.01	Perbuatan Curang (Tahap Perencanaan)	Sekretaris Camat	Internal	C	Barang menumpuk dan tidak terpakai, ruang penyimpanan penuh, 3 E tidak sesuai (efektif, efisien, ekonomis)	Kecamatan Denpasar Barat	3	2	6	Rendah	Keputusan Walikota Denpasar Nomor 186/451/1560/HK/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - Keputusan Walikota Denpasar Nomor 186/451/135/HK/2022 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Grafikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar - Review data historis kebutuhan tahun sebelumnya dan mengacu pada standar biaya pemerintah sebagai standar perhitungan	Pengaturan peran Pengelola Barang/Aset dalam verifikasi ROKMD - Dilakukan perbandingan harga pasar dengan e-catalog - Verifikasi oleh pejabat berjenjang					
4							Mark-up Bukti Belanja atau Manipulasi Nota	Terjadinya pengglembungan nilai pada bukti belanja, penggunaan nota palsu atau hasil modifikasi, serta pencatatan biaya lebih tinggi dari transaksi sebenarnya untuk tujuan memperbesar nilai pertanggungjawaban	RF.26.41.37.02	Kerugian Keuangan Negara (Tahap Pertanggungjawaban)	Sekretaris Camat	Internal	C	Potensi Petty corruption	Kecamatan Denpasar Barat	2	1	2	Sangat Rendah	- Standar Biaya (SSH) sebagai acuan harga - SPI internal (PPK, PPTK)	Penerapan verifikasi keaslian bukti belanja (cross-check ke penyedia), Pelarangan penggunaan nota tidak resmi / note edit digital					
5		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.098.281.305			Terpenuhi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak sesuai dengan kebutuhan	Kesalahan input data, keterlambatan pelaporan, dan gangguan system, penggunaan anggaran tidak sesuai peruntukan, dan ketidaksesuaian anggaran kas dengan realisasi.	ROO.26.41.37.02		Kasubag Umum dan Kepegawaian, Bendahara Gaji dan Sekam	Eksternal	UC	Gaji dan tunjangan tidak dapat dibayarkan tepat waktu kepada pegawai yang bersangkutan	Kecamatan Denpasar Barat	2	1	2	Sangat Rendah	Mengajukan permohonan perseseran anggaran	Mengkoordinasi agar penitriman gaji pegawai yang mutasi agar masih menggunakan gaji dan tempat asal tidak terputus, sampai dapat dianggarkan pada RKA TA selanjutnya.					
6							Pernyataan palsu terkait jumlah pegawai	Pegawai yang menangan kepegawaian dan perencanaan menyatakan jumlah pegawai yang tidak sesuai dengan jumlah sebenarnya	RF.26.41.37.03	Pernyataan Palsu (Tahap Perencanaan)	Kasubag Umum & Kepegawaian, Bendahara Gaji dan Sekam	Internal	C	Proses pembayaran gaji tertambat	Kecamatan Denpasar Barat	2	1	2	Sangat Rendah	Mengajukan permohonan perseseran anggaran	Melaksanakan rekonsiliasi gaji secara berkala					
7							Grafikasi dalam proses kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala	Pegawai yang menangan kepegawaian menerima hadiah berupa barang/jasa tunai untuk memancing proses kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala	RF.26.41.37.04	Grafikasi (Tahap Pertanggungjawaban)	Kasubag Umum dan Kepegawaian, Bendahara Gaji dan Sekam	Internal	C	Kepercayaan kepada pelaku risiko berkurang	Kecamatan Denpasar Barat	2	1	2	Sangat Rendah	Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengendalian Grafikasi di Lingkungan Kota Denpasar	1. Adanya SOP yang mengatur tentang prosedur manajemen pegawai 2. Menyusun Buku Petunjuk Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala					
8							Kerugian keuangan negara akibat kurang terbanya administrasi pertanggungjawaban kepegawaian terkait gaji dan tunjangan	Pegawai yang masih menerima administrasi (anak maupun keluarga) dengan kondisi secara administrasi seharusnya sudah tidak menerima tunjangan tersebut namun belum dilaporkan kepada bendahara gaji	RF.26.41.37.05	Perbuatan Curang (Tahap Pertanggungjawaban)	Kasubag Umum & Kepegawaian	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Kecamatan Denpasar Barat	2	1	2	Sangat Rendah	1. SOP Sistem penganggaran dan Tunjangan ASN 2. Peraturan Pemerintah (PP) No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas ayat PP No 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Presiden (PERPRES) No 16 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Gaj Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2015 ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019	1. Adanya SOP yang mengatur tentang prosedur manajemen pegawai 2. Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi terkait tunjangan ASN					
9		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.012.625.800			Terpenuhi Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyusunan anggaran barang pakai habis tidak memenuhi kebutuhan ril	Pengelolaan surat, dokumen kearsipan, pengadaan logistik/inventaris kantor, pelayanan administrasi kepegawaian	ROO.26.41.37.03		Kasubag Umum & Kepegawaian	Eksternal	UC	Administrasi Perkantoran Tidak Maksimal	Kecamatan Denpasar Barat	2	1	2	Sangat Rendah	Pembuatan SPI yang sesuai dengan DPA yang telah ditetapkan	Menentukan Prioritas Anggaran					
10							Grafikasi dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa	Pembelian grafikasi dari penganggaran pengadaan barang & jasa	RF.26.41.37.06	Grafikasi (Tahap Perencanaan)	Kasubag Umum & Kepegawaian	Internal	C	Perencanaan penganggaran yang tidak tepat	Kecamatan Denpasar Barat	2	1	2	Sangat Rendah	Perwali Nomor 6 Tahun 2019 tentang pengendalian Grafikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Memilih Penyedia Yang Sudah Terverifikasi oleh LKPP					
11							Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	Pegawai Pelaksana Teknis memberikan bukti - bukti yang sudah direvisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban	RF.26.41.37.07	Perbuatan Curang (Tahap Pertanggungjawaban)	Kasubag Umum & Kepegawaian	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dan terjadi Petty corruption	Kecamatan Denpasar Barat	2	1	2	Sangat Rendah	1. Perka LKPP No 9 Tahun 2021 tentang loko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang jasa pemerintah 2. Surat Lembang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16578/KA/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 perihal Percepatan Penyelenggaraan Katalog Elektronik Lokal dan Penitntaan Toko Daring	Melakukan pembelajaran dengan menggunakan sistem e-purchasing					

Ba rie	Nama OPD	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran RKA 2026 (Rp)	Hasil Evaluasi Risiko																	Risiko Komposit				
				Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Risiko (Uraian)	Skenario Risiko	Kode Risiko	Jenis Risiko Fraud	Pemilik	Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Status Risiko	Existing Control (Pengendalian yang sudah ada)	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko
												Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena									
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
12		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	488.096.000			Tersedianya Barang Milik Daerah	Penyediaan Barang Milik Daerah Tidak dapat terealisasi	Risiko perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pengadaan, risiko operasional dan kualitas, dan risiko regulasi dan hukum.	ROO.26.41.37.04		Sekcam	Pembuatan RKBMD belum terlaksana sesuai kebutuhan karena kurangnya koordinasi antar pejabat dan petugas yang membuat RKBMD	Internal	C	Kebutuhan barang tidak terpenuhi	Kecamatan Denpasar Barat	3	2	6	Rendah	Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Denpasar	Koordinasi antara seluruh pejabat dan petugas RKBMD terkait pengadaan dan pemeliharaan barang yang dibutuhkan			
13							Suap dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa	Suap dari rekanan kepada pejabat terkait pengadaan barang & jasa	RF.26.41.37.08	Suap menyuap (Tahap Perencanaan)	Sekcam	Pemilihan Penyedia barang yang kurang tepat	Eksternal	UC	- Pengadaan barang kurang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan - Potensi Petty corruption dan trading in influence	Kecamatan Denpasar Barat	2	1	2	Sangat Rendah	Perwali Nomor 6 Tahun 2019 tentang pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Memilih Penyedia Yang Sudah Terverifikasi oleh LKPP			
							Gratifikasi atas pengadaan barang dan jasa	Pemberian gratifikasi dari rekanan kepada pejabat terkait pengadaan barang dan jasa	RF.26.41.37.09	Gratifikasi (Pertanggungjawaban)	Sekcam	Pemilihan Penyedia barang yang kurang tepat	Eksternal	UC	- Pengadaan barang kurang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan - Terjadi Petty corruption dan trading in influence	Kecamatan Denpasar Barat	3	2	6	Sedang	Perwali Nomor 6 Tahun 2019 tentang pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Memilih Penyedia Yang Sudah Terverifikasi oleh LKPP			
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	4.873.493.454			Tersedianya Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Keterlambatan Pembayaran Gaji Kontrak	Pelayanan yang tidak optimal, pengadaan tidak sesuai spesifikasi dan terdapat penyimpangan anggaran.	ROO.26.41.37.05		Kasubag Umum & Kepegawaian	Keterlambatan Pengumpulan Absensi	Internal	C	Menurunnya Kinerja Tenaga Non ASN	Kecamatan Denpasar Barat	2	1	2	Sangat Rendah	SPK antara Camat dengan Tenaga Kontrak	Melakukan Koordinasi			
							Suap dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa	Suap dari rekanan kepada pejabat terkait pengadaan barang & jasa	RF.26.41.37.10	Suap menyuap (Tahap Perencanaan)	Kasubag Umum & Kepegawaian	Pemilihan Penyedia barang yang kurang tepat	Eksternal	UC	- Pengadaan barang kurang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan - Potensi Petty corruption dan trading in influence	Kecamatan Denpasar Barat	2	1	2	Sangat Rendah	Perwali Nomor 6 Tahun 2019 tentang pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Memilih Penyedia Yang Sudah Terverifikasi oleh LKPP			
							Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	Pgabat Pelaksana Tesis Kegiatan (PPTK) memberikan bukti-bukti yang sudah direvisi sebagai bentuk pertanggungjawaban	RF.26.41.37.11	Perbuatan Curang (Tahap Pertanggungjawaban)	Kasubag Umum & Kepegawaian	Lemahnya Pengawasan dan lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan	Internal	C	- Potensi Petty corruption - Trading in influence	Kecamatan Denpasar Barat	2	1	2	Sangat Rendah	1.Perka LKPP No.9 Tahun 2021 tentang loka ding dan katalog elektronik dalam pengadaan barang jasa pemerintah 2.Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16578/KA/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 perihal Percepatan Penyelenggaraan Katalog Elektronik Lokal dan Pemantauan Toko Daring	Melakukan pembelian dengan menggunakan sistem e-purchasing			
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	2.552.956.000			Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Barang Milik Daerah tidak terpelihara dengan baik	Pemeliharaan tidak optimal, keterlambatan pekerjaan	ROO.26.41.37.06		Sekcam	Belum Optimalnya Pemeliharaan Terhadap Barang Milik Daerah	Internal	C	Operasional Kantor Terhambat	Kecamatan Denpasar Barat	3	2	6	Sedang	Pencatatan Barang Milik Daerah pada SNMDA Barang	Melaksanakan Rapat Koordinasi terkait penggunaan Bang Milik Daerah			
							Suap dalam proses pemeliharaan pengadaan barang & jasa	Suap dari rekanan kepada pejabat terkait pengadaan barang & jasa	RF.26.41.37.12	Suap menyuap (Tahap Perencanaan)	Sekcam	Pemilihan Penyedia barang yang kurang tepat	Eksternal	UC	- Pengadaan barang kurang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan - Terjadi Petty corruption - Trading in influence	Kecamatan Denpasar Barat	2	1	2	Sangat Rendah	Perwali Nomor 6 Tahun 2019 tentang pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Memilih Penyedia Yang Sudah Terverifikasi oleh LKPP			
							Gratifikasi atas pemeliharaan barang dan jasa	Pemberian gratifikasi dari rekanan kepada pejabat terkait pengadaan barang dan jasa	RF.26.41.37.13	Gratifikasi (Tahap Pertanggungjawaban)	Sekcam	Pemilihan Penyedia jasa pemeliharaan barang yang kurang tepat	Eksternal	UC	Pemeliharaan barang kurang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Kecamatan Denpasar Barat	2	1	2	Sedang	Perwali Nomor 6 Tahun 2019 tentang pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Memilih Penyedia Yang Sudah Terverifikasi oleh LKPP			

Ba rie	Nama OPD	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran RKA 2026 (Rp)	Hasil Evaluasi Risiko																	Risiko Komposit					
				Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Risiko (Uraian)	Skenario Risiko	Kode Risiko	Jenis Risiko Fraud	Pemilik	Sebab		CUC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkin an	Nilai Risiko	Status Risiko	Existing Control (Pengendalian yang sudah ada)	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Skala Dampak	Skala Kemungkin an	Nilai Risiko	
												Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena										
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	
		Program : Penyenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	191.170.500	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat	Penurunan Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Kurang optimalnya kinerja pelayanan kecamatan	RSO.26.41.37.01		Camat	Kompetensi petugas yang belum memadai, SOP pelayanan tidak dijalankan secara konsisten, kurangnya monitoring dan evaluasi rutin terhadap kualitas pelayanan	Eksternal	UC	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Rendah	Kecamatan Denpasar Barat	2	2	4	Sangat Rendah	-Koordinasi baik secara internal maupun eksternal -Penerapan SOP Pelayanan Kecamatan -Perbaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala -Monitoring harian oleh Kasi Pelayanan Umum dan Kependudukan	-Melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat -Perbaikan fasilitas ruang tunggu, sistem antrian, peralatan komputer dan jaringan internet untuk mendukung pelayanan -Memberikan kesempatan untuk mengikuti sosialisasi/pelatihan kepada petugas yang ditempatkan di sentra pelayanan untuk meningkatkan kualitasnya	2	2	2	4
							Potensi terjadinya penyimpangan integritas seperti suap, gratifikasi, dan benturan kepentingan dalam proses pelayanan publik.	Terjadinya pemberian suap atau gratifikasi kepada pegawai serta pelanggaran tidak objektif akibat benturan kepentingan dalam proses pelayanan publik	RF.26.41.37.14	Suap menyup (Tahap Perencanaan)	Kasi Pelayanan Umum dan Kependudukan	Kurangnya pengawasan internal terhadap proses pelayanan dan rendahnya pemahaman pegawai tentang regulasi anti-gratifikasi dan kode etik	Internal	C	- Hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan terjadinya pelanggaran hukum atas kode etik ASN - Potensi pelanggaran istimewa dan tidak adil - Tidak tercapainya Zone Integritas WSK	Kecamatan Denpasar Barat	2	2	4	Rendah	Perwili Nomor 6 Tahun 2019 tentang pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Meningkatkan sistem pengawasan internal dan melaksanakan pelatihan/ sosialisasi kepada pejabat tentang integritas dan anti-gratifikasi				
							Manipulasi Data Output dan Kinerja	Pelaporan capaian output, termasuk nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) direvisasi untuk meningkatkan nilai kinerja	RF.26.41.37.15	Pertipuan Curang (Tahap Pertanggungjawaban)	Kasi Pelayanan Umum dan Kependudukan	Minimnya partisipasi masyarakat dalam memberi opinion balik yang valid	Eksternal	UC	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKMSKM) menjadi tidak akurat	Kecamatan Denpasar Barat	2	2	4	Rendah	Memantau pengaduan masyarakat secara berkala serta meningkatkan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Penyempurnaan sistem informasi yang terintegrasi dan validasi data hasil SKM sebelum finalisasi laporan				
		Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	170.733.500			Terlaksananya Koordinasi di tingkat Kecamatan	Tidak komprehensivitas dokumen proposal yang diajukan sebagai usuln Musrenbang Kecamatan	Usulan yang diajukan tidak dianalisa proposal maupun data dukung yang memadai sehingga kesulitan pada saat penginputan maupun verifikasi usulan	ROO.26.41.37.07		Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kurangnya pemahaman terhadap proses atau tahapan pelaksanaan musrenbang dan kurangnya pemahaman atas sibek usulan karena hambatan data dukung	Eksternal dan Internal	UC dan C	Kurang Puanysa Desa atau Kelurahan Terhadap Kinerja Pemerintah	Kecamatan Denpasar Barat	2	2	4	Sangat Rendah	RPJMD Kota Denpasar 2021-2026	Rapat Koordinasi Sosialisasi Terhadap Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota				
							Adanya benturan kepentingan antara Pemerintah Kota dengan Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan	Usulan kegiatan dari desa dan Kelurahan yang ditetujui ataupun tidak disetujui oleh Camat maupun Walikota dalam Musrenbang karena didasar motif kepentingan tertentu.	RF.26.41.37.16	Benturan Kepentingan (Perencanaan)	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Pemilihan prioritas pembangunan yang belum merata	Eksternal	UC	- Kurang Puanysa Desa atau Kelurahan Terhadap Kinerja Pemerintah - Potensi trading in influence	Kecamatan Denpasar Barat	2	2	4	Sangat Rendah	RPJMD Kota Denpasar 2021-2027	Rapat Koordinasi Sosialisasi Terhadap Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota				
							Suap dalam proses pengadaan barang & jasa dalam pelaksanaan kegiatan Musrenbang	Suap dari rekanan kepada pejabat terkait pengadaan barang & jasa	RF.26.41.37.17	Suap (Pertanggungjawaban)	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Pemilihan Penyedia barang yang kurang tepat	Eksternal	UC	- Pengadaan barang kurang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan - Potensi trading in influence dan Petty Corruption	Kecamatan Denpasar Barat	2	1	2	Sangat Rendah	Perwili Nomor 6 Tahun 2019 tentang pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Memilih Penyedia Yang Sudah Terverifikasi oleh LKPP				
							Suap dalam proses pengadaan barang & jasa dalam pelaksanaan kegiatan PKK	Suap dari rekanan kepada pejabat terkait pengadaan barang & jasa	RF.26.41.37.18	Suap (Pertanggungjawaban)	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Pemilihan Penyedia barang yang kurang tepat	Eksternal	UC	- Pengadaan barang kurang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan - Potensi trading in influence dan Petty Corruption	Kecamatan Denpasar Barat	2	1	2	Sangat Rendah	Perwili Nomor 6 Tahun 2019 tentang pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Memilih Penyedia Yang Sudah Terverifikasi oleh LKPP				
		Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Simpahkan Kepada Camat	20.437.000			Terlaksananya Pimpahan Urusan Pemerintahan Kepada Camat	Ketidakefektifan Pelaksanaan Pimpahan Urusan Pemerintahan kepada Camat	Ketidakefektifan terpadu karena kurangnya penjelasan dan pemahaman petugas maupun masyarakat, sehingga proses pelayanan menjadi tidak optimal	ROO.26.41.37.08		Kasi Pelayanan Umum dan Kependudukan	Kurangnya Penjelasan yang diberikan oleh Petugas Pelaksanaan Survei Terhadap Pengguna Layanan tentang Subjek/Objek yang diteliti	Eksternal	UC	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Rendah	Kecamatan Denpasar Barat	2	1	2	Sangat Rendah	PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat				
							Suap dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa terkait urusan pemerintahan yang simpahkan kepada Camat	Suap dari rekanan kepada pejabat terkait penganggaran barang & jasa	RF.26.41.37.19	Suap (Perencanaan)	Kasi Pelayanan Umum dan Kependudukan	Pemilihan Penyedia barang yang kurang tepat	Eksternal	UC	- Pengadaan barang kurang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan - Potensi trading in influence dan Petty Corruption	Kecamatan Denpasar Barat	2	1	2	Sangat Rendah	Perwili Nomor 6 Tahun 2019 tentang pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Memilih Penyedia Yang Sudah Terverifikasi oleh LKPP				
							Gratifikasi atas pemberian layanan	Pemberian gratifikasi dari masyarakat kepada petugas pemberi layanan	RF.26.41.37.20	Gratifikasi (Pertanggungjawaban)	Kasi Pelayanan Umum dan Kependudukan	Pemahaman atau pengalihan tentang pengendalian gratifikasi yang masih rendah	Eksternal	UC	Pelayanan yang tidak maksimal atau tidak adil	Kecamatan Denpasar Barat	2	2	4	Sangat Rendah	Perwili Nomor 6 Tahun 2019 tentang pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Sosialisasi kepada petugas pelayanan tentang pengendalian gratifikasi				

Ba rie	Nama OPD	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran RKA 2026 (Rp)	Hasil Evaluasi Risiko																	Risiko Komposit					
				Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Risiko (Uraian)	Skenario Risiko	Kode Risiko	Jenis Risiko Fraud	Pemilik	Sebab		CUCU	Dampak	Skala Dampak	Skala Kemungkin an	Nilai Risiko	Status Risiko	Existing Control (Pengendalian yang sudah ada)	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		
												Uraian	Sumber												Uraian	Pihak yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	
		Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	7.254.147.839	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Fasilitasi Uraian Peningkat Daerah di Tingkat Kecamatan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan desa/kelurahan sehingga program tidak berjalan optimal	Kurangnya minat dan kesadaran masyarakat akan manfaat program pemberdayaan	RSO.26.41.37.02		Lurah	Kurangnya minat dan kesadaran masyarakat akan manfaat program pemberdayaan	Eksternal	UC	Serapan anggaran rendah, program pemberdayaan tidak mencapai sasaran	Kecamatan Depasar Barat dan Kelurahan	2	2	4	Sangat Rendah	-Koordinasi baik secara internal masup eksternal -Sosialisasi kegiatan melalui pertemuan rutin kelurahan/kecamatan	Melaksanakan Koordinasi dengan Lurah jgtr Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bisa Terlaksana Dengan Baik	2	2	2	4
							Suap dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terjadinya suap menyup dari rekanan kepada pejabat terkait penganggaran barang & jasa	RF.26.41.37.21	Suap Menyup (Tahap Perencanaan)	Lurah	Tekanan dari pihak berkepentingan yang ingin memastikan usulannya masuk protes	Eksternal	UC	Usulan menjadi tidak tepat sasaran, menyebabkan program tidak memberi manfaat optimal	Kecamatan Depasar Barat dan Kelurahan	3	2	6	Rendah	Perwil Nomor 6 Tahun 2019 tentang pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Depasar	Memilih Penyedia Yang Sudah Terverifikasi oleh LKPP				
							Oratifikasi dalam proses pengadaan barang jasa terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pembelian gratifikasi dari rekanan kepada pejabat aggr menyekui laporan peranggungjawaban tanpa perencanaan memadai	RF.26.41.37.22	Oratifikasi (Peranggungjawaban)	Lurah	1. Pemahaman pegawai tentang anti-gratifikasi masih rendah 2. Lemahnya pengawasan internal 3. Keuntungan pribadi	Eksternal	UC	Data peranggungjawaban menjadi tidak akurat	Kecamatan Depasar Barat dan Kelurahan	2	2	4	Sangat Rendah	Perwil Nomor 6 Tahun 2019 tentang pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Depasar	Memilih Penyedia Yang Sudah Terverifikasi oleh LKPP				
		Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan	7.254.147.839			Persentase Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan Rendah	Masyarakat enggan terlibat dalam kegiatan pemberdayaan sehingga kegiatan tidak dapat berjalan efektif dan tidak mencapai tujuan yang drencanakan	ROO.26.41.37.09		Lurah	Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan	Eksternal	UC	Progran pemberdayaan tidak mencapai target dan anggaran kegiatan tidak teranep optimal	Kecamatan Depasar Barat dan Kelurahan	2	2	4	Sangat Rendah	-Rerja Kecamatan - Sosialisasi dan Koordinasi	Melaksanakan Koordinasi dengan Lurah jgtr Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bisa Terlaksana Dengan Baik				
							Adanya trading in influence dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	intimidasi dan rekanan kepada pejabat terkait penganggaran barang & jasa	RF.26.41.37.23	Perbuatan curang (Tahap Perencanaan)	Lurah	Pemilihan Penyedia barang yang kurang tepat	Eksternal	UC	Potensi trading in influence	Kecamatan Depasar Barat dan Kelurahan	2	1	2	Sangat Rendah	Perwil Nomor 6 Tahun 2019 tentang pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Depasar	Memilih Penyedia Yang Sudah Terverifikasi oleh LKPP				
							Oratifikasi dalam proses pengadaan barang jasa terkait pemberdayaan kelurahan	Pembelian gratifikasi dari rekanan terkait kegiatan pemberdayaan kelurahan kepada petugas atau pegawai kelurahan	RF.26.41.37.24	Oratifikasi (Peranggungjawaban)	Lurah	Pemilihan penyedia atau rekanan yang kurang tepat	Eksternal	UC	Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang kurang maksimal	Kecamatan Depasar Barat dan Kelurahan	2	2	4	Sangat Rendah	Perwil Nomor 6 Tahun 2019 tentang pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Depasar	Memilih Penyedia Yang Sudah Terverifikasi oleh LKPP				
		Program : Koordinasi Kelerntaman dan Keterlibatan Umum	583.913.350	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Terselenggaranya Uraian Peningkat Daerah di Tingkat Kecamatan	Persentase Tingkat Keterntaman dan Keterliban Umum	Meningkatnya gangguan keamanan, keterliban umum di masyarakat	Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap keterntaman dan keterliban umum	RSO.26.41.37.03		Camat	Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan Keterntaman dan Keterliban Umum	Eksternal	UC	Meningkatnya potensi gangguan Keterntaman dan Keterliban Umum	Kecamatan Depasar Barat	2	2	4	Sangat Rendah	-Melaksanakan Giat Patroli Pemantauan Wilayah Kecamatan secara rutin -Koordinasi rutin dengan Satpol PP dan petugas keamanan setempat	-Melaksanakan rapat koordinasi terkait Keterntaman dan Keterliban Umum - Sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan bersama -Melakukan patroli dan monitoring dengan jadwal tetap dan laporan berkala	2	2	2	4
							Oratifikasi dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa terkait pengakan Perda dan Perkada	Gratifikasi dari rekanan kepada pejabat terkait penganggaran barang & jasa	RF.26.41.37.25	Oratifikasi (Perencanaan)	Kasi Keterntaman dan Keterliban	Pemilihan Penyedia barang yang kurang tepat	Eksternal	UC	Pengadaan barang kurang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Kecamatan Depasar Barat	2	1	2	Sangat Rendah	Perwil Nomor 6 Tahun 2019 tentang pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Depasar	Memilih Penyedia Yang Sudah Terverifikasi oleh LKPP				
							Suap dalam proses pendirian terhadap pelanggaran Perda Perkada	Suap dari masyarakat yang melanggar Perda Perkada kepada petugas	RF.26.41.37.26	Suap (Peranggungjawaban)	Kasi Keterntaman dan Keterliban	Adanya oknum yang masih menerima suap	Eksternal	UC	Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparut pemerintah	Kecamatan Depasar Barat	2	2	4	Sangat Rendah	Perwil Nomor 6 Tahun 2019 tentang pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Depasar	Melaksanakan rapat koordinasi terkait dengan kegiatan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan				
		Kegiatan : Koordinasi Penerimaan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	583.913.350			Tetapkannya Koordinasi Penerimaan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerimaan dan Penegakan Perda Tidak Terlaksana dengan Baik Kepala Daerah	Risiko Administratif	ROO.26.41.37.10		Kasi Keterntaman dan Keterliban	Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan Pelaksanaan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	Eksternal	UC	Keterntaman dan keterliban terganggu	Kecamatan Depasar Barat	2	2	4	Sangat Rendah	Perda Kota Depasar No.1 Tahun 2015 tentang Keterliban Umum	Melaksanakan rapat koordinasi terkait dengan kegiatan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan				
							Oratifikasi dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa terkait pengakan Perda dan Perkada	Gratifikasi dari rekanan kepada pejabat terkait penganggaran barang & jasa	RF.26.41.37.27	Oratifikasi (Perencanaan)	Kasi Keterntaman dan Keterliban	Pemilihan Penyedia barang yang kurang tepat	Eksternal	UC	Potensi trading in influence	Kecamatan Depasar Barat	2	1	2	Sangat Rendah	Perwil Nomor 6 Tahun 2019 tentang pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Depasar	Memilih Penyedia Yang Sudah Terverifikasi oleh LKPP				
							Suap dalam proses pendirian terhadap pelanggaran Perda Perkada	Suap dari masyarakat yang melanggar Perda Perkada kepada petugas	RF.26.41.37.28	Suap (Peranggungjawaban)	Kasi Keterntaman dan Keterliban	Adanya oknum yang masih menerima suap	Eksternal	UC	Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparut pemerintah	Kecamatan Depasar Barat	2	2	4	Sangat Rendah	Perwil Nomor 6 Tahun 2019 tentang pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Depasar	Melaksanakan rapat koordinasi terkait dengan kegiatan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan				

Ba ri	Nama OPD	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran RKA 2026 (Rp)	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Risiko (Uraian)	Skenario Risiko	Kode Risiko	Jenis Risiko Fraud	Pemilik	Hasil Evaluasi Risiko				Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Status Risiko	Existing Control (Pengendalian yang sudah ada)	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Risiko Komposit								
												Sabab		Dampak								Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Status Risiko	Existing Control (Pengendalian yang sudah ada)	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko
												Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena															
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)				
		Program : Penyelenggaraan Usaha Pemerintahan Umum	64.636.000	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Fasilitasi Usaha Peringkat Daerah di Tingkat Kecamatan	Persentase Peningkatan Partisipasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan di Kecamatan	Informasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, belum bisa mencakup seluruh masyarakat di Kecamatan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tidak berjalan secara maksimal	RSO.26.41.37.04		Camat	Keterbatasan anggaran, kurangnya pelaksanaan sosialisasi	Internal	C	Realisasi kegiatan terhambat dan masyarakat kesulitan mendapatkan informasi	Kecamatan Depaspar Barat	2	2	4	Sangat Rendah	Koordinasi baik secara internal maupun eksternal	Sosialisasi yang lebih masif tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan di Kecamatan		2	2	4				
							Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dipilih dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan berdasarkan analisis kebutuhan, tetapi karena kebiasaan dengan pihak tertentu	Pemilihan kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dipilih dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada hubungan personal, bukan perimbangan objektif kebutuhan atau manfaat bagi masyarakat	RF.26.41.37.20	Bantuan kepingan dalam pengada (Tahap Perencanaan)	Camat	Intervensi pihak berkepentingan	Internal	C	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dipilih dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak berdasarkan analisis kebutuhan atau manfaat ke masyarakat	Kecamatan Depaspar Barat	2	2	4	Sangat Rendah	Monitoring & Evaluasi atau Kunjungan apangan oleh pegawai teknis	Penguatan transparansi dalam hal pemilihan kegiatan dan meminta saran atau masukan dari perwakilan dan tokoh masyarakat								
							Pemaluan kegiatan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Laporan kegiatan telah diselesaikan dan tercapai sesuai target pejabat kegiatan tersebut belum mencapai target atau sama sekali tidak dilaksanakan	RF.26.41.37.30	Pemlyatan Patau (Tahap Pertanggungjawaban)	Camat	Mekanisme pengawasan lemah	Internal	C	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dipilih dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak berdasarkan analisis kebutuhan atau manfaat ke masyarakat	Kecamatan Depaspar Barat	2	1	2	Sangat Rendah	Monitoring & Evaluasi atau Kunjungan apangan oleh pegawai teknis	Setiap kegiatan wajib dilakukan dokumentasi, baik foto maupun video kegiatan								
		Kegiatan : Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum Secara Pengawasan Kepala Daerah	64.636.000			Tertindakannya Patingan Hari- hari besar , Nasional dan Daerah	Kegiatan HUT RI dan HUT Kota Depaspar tidak berjalan secara maksimal	Pada saat pelaksanaan kegiatan, para peserta kurang mempunyai komitmen dan kedisiplinan seperti keterlambatan hadir, tidak aktif dalam kegiatan	ROO.26.41.37.11		Kasi Pemerintahan	Kurangnya Antusias Masyarakat akan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Eksternal	UC	Realisasi kegiatan terhambat dan tidak sesuai target atau angsur	Kecamatan Depaspar Barat	2	2	4	Sangat Rendah	Tata tertib dan Juknis Kegiatan	1. Melakukan sosialisasi masif mengenai adwaf, tujuan, manfaat, dan mekanisme kegiatan. 2. Menentukan waktu dan lokasi kegiatan secara strategis, agar tidak mengganggu aktivitas peserta. 3. Memberikan panduan atau daftar pemeriksaan (checklist) berisi dokumen, alat, atau data yang perlu disiapkan peserta sebelum kegiatan dimulai.								
							Dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa tidak berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya	Pelaku Pengadaan (PPK) mengajukan barang/jasa tidak sesuai dengan kebutuhan	RF.26.41.37.31	Bantuan kepingan dalam pengada (Tahap Perencanaan)	Kasi Pemerintahan	Pemilihan penyedia atau mekanisme yang kurang tepat dan pengadaan barang kurang sesuai dengan kebutuhan	Internal	C	Pelaksanaan kegiatan Wawasan Kebangsaan terhambat atau kurang maksimal - Potensi Trading in influence	Kecamatan Depaspar Barat	2	2	4	Sangat Rendah	1) Perwali Nomor 6 Tahun 2019 tentang pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Depaspar 2) Perpes No. 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah	Memilih Penyedia Yang Sudah Terverifikasi oleh LKPP, dan melakukan evaluasi setelah kegiatan								
							Terdapat markup nilai pengadaan barang/jasa pada laporan	Pelaku Pengadaan (PA, PPK, PP, Podj Pemilihan) melakukan kerjasama dengan penyedia untuk markup nilai	RF.26.41.37.32	Kegiatan keuangan negara (Tahap Pertanggungjawaban)	Kasi Pemerintahan	lemahnya pengawasan, kemahnya verifikasi baik untuk pelaporan, untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Bagaiman menyebutkan kegiatan keuangan negara	Kecamatan Depaspar Barat	2	2	4	Sangat Rendah	Pengawasan Anggaran melaksanakan sosialisasi secara berkala terkait larangan markup nilai pengadaan kepada seluruh pejabat/pihak yang menangani pengadaan barang/jasa	Melaksanakan review terkait bebas pertanggungjawaban pengadaan barang/jasa								
		Program : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	34.355.000	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Ban Keuangan Desa	Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan	Keterlambatan Penyampaian Laporan Pemerintahan Desa	Keterlambatan penyampaian laporan realisasi keuangan pemerintahan desa	RSO.26.41.37.05		Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Camat, Perbaket	Kurangnya kedisiplinan administrasi dan manajemen waktu	Eksternal	UC	Terhambatnya proses monitoring oleh kecamatan	Kecamatan Depaspar Barat	2	2	4	Sangat Rendah	Peraturan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Melaksanakan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa serta Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Sesuai dengan Tupoksi Kecamatan		2	2	4				
							Suap dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa terkait pembinaan dari pengawasan desa	Suap dari rekanan kepada pejabat terkait penganggaran barang & jasa	RF.26.41.37.33	Suap (Perencanaan)	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Pemilihan Penyedia barang yang kurang tepat	Eksternal	UC	Pengadaan barang kurang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Kecamatan Depaspar Barat	2	1	2	Sangat Rendah	Perwali Nomor 6 Tahun 2019 tentang pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Depaspar	Memilih Penyedia Yang Sudah Terverifikasi oleh LKPP								
							Gratifikasi dalam proses pembinaan dari pengawasan desa	Gratifikasi dari sekretaris desa kepada Kasi Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Depaspar Barat	RF.26.41.37.34	Gratifikasi (Pertanggungjawaban)	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kurangnya pemahaman Desa dan terdapatnya persepsi yang berbeda terhadap aturan secara normatif sehingga proses administrasi di Desa terjadi kekeliruan	Eksternal	UC	Keliruian desa dalam melakukan kegiatan secara administrasi	Kecamatan Depaspar Barat	1	2	2	Sangat Rendah	Perwali Nomor 6 Tahun 2019 tentang pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Depaspar	Sosialisasi tentang penanganan gratifikasi hususnya di desa								
		Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	34.355.000			Tertindakannya Pembinaan dan Pengawasan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Desa tidak optimal	Belum optimalnya pembinaan dari pengawasan desa	ROO.26.41.37.12		Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Minimnya jumlah SDM kecamatan yang bisa diikutsertakan sebagai Tim Pembina dan kurangnya kompetensi SDM yang ditunjuk sebagai Tim Pembina	Internal dan Eksternal	C dan UC	Adanya desa yang tidak melaksanakan administrasi	Kecamatan Depaspar Barat	2	2	4	Sangat Rendah	Peraturan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Mengajukan usulan pengembangan kompetensi, melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan dan aset desa								

Ba rie	Nama OPD	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran RKA 2026 (Rp)	Hasil Evaluasi Risiko																	Risiko Komposit				
				Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Risiko (Uraian)	Skenario Risiko	Kode Risiko	Jenis Risiko Fraud	Pemilik	Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Status Risiko	Existing Control (Pengendalian yang sudah ada)	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko
												Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena									
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
							Tidak komprehensivitas dokumen evaluasi AP/BDes	Dokumen evaluasi yang tidak lengkap ataupun tidak disertai dokumen penunjang	ROO.26.41.37.13		Kasi Pembudayaan Masyarakat	Kurangnya pemahaman Desa dan terjadinya perampasan yang beresita terhadap aturan secara normatif	Eksternal	UC	Kekeliruan desa dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran	Kecamatan Denpasar Barat	2	3	6	Rendah	Peraturan terkait Pengelolaan Keuangan Desa	Melaksanakan Koordinasi terkait penyusunan AP/BDes dengan instansi terkait (OPMD, PD maupun PLD)			
							Perbuatan curang dalam proses penganggaran pengadaan barang & jasa terkait pembinaan dan pengawasan desa	Intimidasi dari rekanan kepada pejabat terkait penganggaran barang & jasa	RF.26.41.37.36	Perbuatan curang (Perencanaan)	Kasi Pembudayaan Masyarakat	Pemilihan Penyedia barang yang kurang tepat	Eksternal	UC	Potensi Petty Corruption dan trading in influence	Kecamatan Denpasar Barat	2	1	2	Sangat Rendah	Perwali Nomor 6 Tahun 2019 tentang pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Memilih Penyedia Yang Sudah Terverifikasi oleh LKPP			
							Gratifikasi dalam proses pembinaan dan pengawasan desa	Gratifikasi dari sekretaris desa kepada Kasi Pembudayaan Masyarakat di Kecamatan Denpasar Barat	RF.26.41.37.36	Gratifikasi (Pertanggungjawaban)	Kasi Pembudayaan Masyarakat	Kurangnya pemahaman Desa dan terjadinya perampasan yang beresita terhadap aturan secara normatif sehingga proses administrasi di Desa terjadi kekeliruan	Eksternal	UC	- Kekeliruan desa dalam mengeksekusi kegiatan secara administrasi - Potensi perlakuan istimewa dan tidak adil	Kecamatan Denpasar Barat	1	2	2	Sangat Rendah	Perwali Nomor 6 Tahun 2019 tentang pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Sosialisasi tentang penanganan gratifikasi khususnya di desa			

Inspektur Pembantu III
Inspektorat Daerah Kota Denpasar

Ika Ayu Indri Kosala Dewi, SE., MM
Pembina Tk. I
NIP. 19730212 199803 2 006

Denpasar, 16 Desember 2025
Camat Denpasar Barat


Wahyu Kusawan, S.STP, M.S.
Pembina Tk. I
NIP. 19770730 199802 1 001

Matriks Analisa Risiko

Matriks Analisa Risiko			Dampak/Konsekuensi				
			Tidak Sigifikan	Kecil	Sedang	Besar	Sangat Signifikan
			1	2	3	4	5
Kemungkinan	Hampir Pasti	5					
	Kemungkinan Besar	4					
	Mungkin	3					
	Kemungkinan Kecil	2					
	Sangat Jarang	1					

Keterangan warna:

	: Sangat Tinggi
	: Tinggi
	: Sedang
	: Rendah
	: Sangat Rendah

Penentuan Kode Risiko : <http://tiny.cc/KodeRisiko>

Tingkat/Jenis Risiko

RSP Risiko Strategis Pemda : kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis pemerintah

RSO Risiko Strategis OPD : kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis OPD

ROO Risiko Operasional OPD : kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan OPD.

RF Risiko Fraud : Risiko Kecurangan

Jenis Risiko Fraud (RF)

- 1 Kecurangan atas asset
- 2 Pernyataan palsu
- 3 Kerugian keuangan negara
- 4 Suap menyuap
- 5 Penggelapan dalam jabatan
- 6 Pemerasan
- 7 Perbuatan curang
- 8 Benturan kepentingan dalam pengadaan
- 9 Gratifikasi
- 10 Trading in Influence (perdagangan pengaruh)

daerah.